

**KERJASAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN
MASYARAKAT DALAM UPAYA MENANGGULANGI BENCANA
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN SINJAI**

RAHMI DAYANTI

Nomor Stambuk 105640174413



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PENGAJUAN SKRIPSI

KERJASAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENANGGULANGI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN SINJAI

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh :

RAHMI DAYANTI

Nomor Stambuk 105640174413

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Masyarakat Dalam Upaya Menanggulangi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai

Nama : Rahmi Dayanti

Nomor Stambuk : 105640174413

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyetuju

Pembimbing 1


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Pembimbing 2


Muh. Ahsan Samad, S.IP., M.Si

Mengetahui

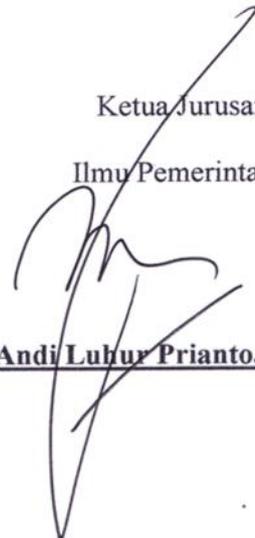
Dekan

Esisipol Unismuh Makassar

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan

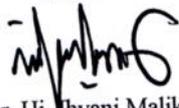

Andi Lubur Prianto, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0068/FSP/A.1-VIII/I/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018.

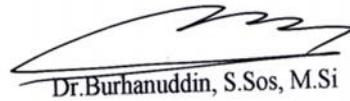
TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Mhyani Malik, S.Sos, M.Si

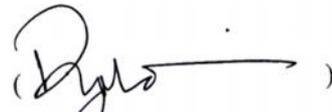
Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si (ketua)



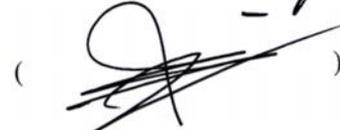
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd



3. Dr.H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si



4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rahmi Dayanti

Nomor Stambuk : 105640174413

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/ di publikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 25 Oktober 2017

Yang Menyatakan,

RAHMI DAYANTI

ABSTRAK

Rahmi Dayanti. *Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Menanggulangi Bencana Tanah Longsor di KABUPATEN Sinjai.* (dibawah bimbingan Drs. H. Ansyari Mone, sebagai Pembimbing I dan Muh.Aksan Samad sebagai Pembimbing II).

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan kerjasama Badan Penanggulangan Bencana daerah dan masyarakat dalam upaya menanggulangi bencana tanah lonsor, serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana tanah lonsor di Kabupaten sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD dilakukan melalui tahapan respon, pemulihan, dan pengembangan. Tahapan paling dominan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten sinjai melalui tindakan response sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Sedangkan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat berupa partisipasi dalam bentuk buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, dan kemahiran, serta partisipasi sosial. Partisipasi yang dominan dilakukan oleh masyarakat adalah partisipasi tenaga dan partisipasi sosial.

Kata kunci: kerjasama, bencana, partisipasi masyarakat

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan yang maha agung dengan cinta-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk merampungkan tugas akhir ini yang mengangkat judul “**kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat dalam Upaya Menanggulangi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai**” Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dijadikan penulis sebagai proses pembelajaran, pengalaman, pendewasaan sekaligus rahmat dari ALLAH SWT yang mampu mentransformasikan prespektif penulias dalam memaknai sesuatu.

Pada kesempatan ini penulias mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang memberikan bantuan secara moril dan material, serta kepada Ibu **Drs. H. Anyari Mone, M.Pd**, selaku pembimbing I dan Bapak **Muh. Aksan Samad, S.IP., M.Si**, selaku pembimbing II, atas waktu dan luangnya yang diberikan disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal sampai terselesaikannya skripsi ini. Rasa terima kasih juga diberikan kepada pihak-pihak yang turut membantu, serta memberi pengaruh kepada penulis selama ini, yaitu:

1. Bapak Rektor Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E. M.M atas kebijaksanaan dan bantuan fasilitas yang di berikan
2. Ibu Dr.Hj .Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Andi Luhur Prianto,S.IP.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala bimbingan yang telah diberikan selama ini
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan
5. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Ikbal dan** Ibunda **Salmah** yang telah memberi sumbangsi materi dan moral
6. Bapak Ketua BPBD Kabupaten Sinjai Drs. A. Junaedi Mustafa dan segenap jajaran pemerintah Di Kantor BPBD Kabupaten Sinjai, terima kasih atas bantuannya sehingga penulis bisa melakukan penelitian.
7. Kakak ku yang tercinta Rahmat hidayat dan Ikha Hardianti yang selalu memberi saya semangat dan dorongan untuk menjadi orang yang sukses dalam meraih gelar sarjana.
8. Keluarga besar yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang tak pernah bosan memberikan motivasi atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam penulisan Skripsi ini.
9. Dan Rekan-rekan mahasiswa (i) seperjuangan yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Hanya

ALLAH SWT, yang menentukan segalanya dan semoga kalian mendapat pahala yang berlimpah ganda d sisi-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tapi setiap manusia berpotensi melakukan gerak menyempurna. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk referensi hidup di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini diberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, Dan Semoga ALLAH SWT memberikan pahala yang berlimpah atas segala kebaikan kita semua. Amin

Makassar, 25 Oktober 2017

RAHMI DAYANTI

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan Tim Penguji.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Table.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan	5
D. Manfaat	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Dasar Kerjasama	6
1. Pengertian kerjasama	6
2. Pengertian bencana.....	8
3. Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana	13
4. Pengertian lonsor.....	22
B. Tingkat kesiapsagaan masyarakat	26
C. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kerjasama SDM dalam menanggulangi bencana tanah longsor	28
D. Kerangka Pikir	34
E. Fokus Penelitian	35
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian	37
C. Sumber Data.....	38

D. Informan Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Wawancara.....	40
2. Observasi.....	40
3. Dokumentasi.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik objek penelitian.....	44
B. Data bencana lonsor di kabupaten sinjai.....	53
C. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.....	54
D. Kerja Sama Masyarakat dan Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai.....	55
1. Indikator Kerjasama.....	55
2. Indikator Penanggulangan Bencana.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Kabupaten Sinjai

Tabel 4.2 Pegawai Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Table 4.3 Data Bencana Tanah Longsor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang rawan bencana hal ini di karenakan letak geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik menyebabkan Negara ini rentan terhadap gunung meletus. Indonesia juga merupakan Negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia posisi geografis yang terletak di ujung pergerakan tiga lempeng dunia: Eurasia, Indonesia rentan pula terhadap resiko ancaman gempa dan tsunami.

Berdasarkan Kementrian PU, korban terbesar dari bencana adalah masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Oleh karena itu masyarakat di harapkan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana (PP 21 tahun 2008). Hal ini di lakukan melalui upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Masyarakat yang siap dan waspada terhadap bencana dapat mengurangi, mencegah bahkan menghilangkan resiko bencana.

Salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh rakyat yang tertimpa bencana adalah kurang-sigapan pemerintah dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Sering kali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar departemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi. Terlalu panjang dan berliku-likunya proses

birokrasi juga kadang menjadi penyebab terasanya kekurang-sigapan pemerintah dalam menangani dampak pasca bencana

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai *forcemajore* yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan lokal daerah setempat, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah yang mempunyai resiko terhadap bencana. Bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir tanah longsor terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana tanah longsor sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (permukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan), pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan permukiman di daerah dataran menjadi langganan banjir .

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapisecaraparsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*) (Depkominfo,2007).

Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanjanegara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup

pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana di daerah

Kabupaten Sinjai secara fisik, wilayahnya berpotensi sangat rentang terhadap terjadinya bencana gerakan tanah. Secara fisiografis pada bagian barat daerah sinjai di dominasi oleh dataran tinggi yang meliputi pegunungan Manipi sedangkan di bagian timur membujur dari utara ke selatan terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan (Bakossurtanal, 1991).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Masyarakat dalam Upaya Menanggulangi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana tanah longor di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya menanggulangi bencana tanah longsor di kabupaten Sinjai?

C. Tujuan penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kerja sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana tanah longsor?

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat diketahui manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap melalui hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi dunia perguruan tinggi khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan guna untuk mengembangkan lebih luas dan lebih mendalam tentang “Kerja sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Masyarakat dalam upaya menanggulangi bencana tanah longsor di kabupaten sinjai”.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peran pemerintah daerah dalam menanggulangan resiko bencana, terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana alam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Kerjasama

1. Pengertian kerjasama

Kerjasama adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Kerjasama dan pertentangan merupakan dua sifat yang dapat di jumpai dalam seluruh proses sosial atau masyarakat, di antara seseorang dengan orang lain, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan seseorang. Pada umumnya kerjasama menganjurkan persahabatan, akan tetapi kerjasama dapat di lakukan di antara dua pihak yang tidak bersahabat, atau bahkan bertentangan di namakan kerjasama berlawanan (*antagonic cooperation*). Merupakan suatu kombinasi yang amat produktif dalam masyarakat modern. (Ainun. 2014)

Makna kerjasama merupakan sifat ketergantungan manusia memungkinkan dan mengharuskan setiap insan atau kelompok sosial untuk selalu berinteraksi dengan orang lain atau kelompok. Hubungan dengan pihak lain yang di laksanakan dalam suatu hubungan yang bermakna adalah hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama bermakna bagi diri atau kelompok sosial sendiri, maupun bagi orang lain atau kelompok yang di ajak kerjasama. Makna timbal balik ini harus di usahakan dan di capai, sehingga harapan harapan, motivasi, sikap dan lain-lainnya yang ada pada diri dan kelompok dapat di ketahui oleh orang atau kelompok lain. Dengan adanya hubungan timbal balik ini akan menghilangkan

kecurigaan, prasangka, dan praduga. kerjasama adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. (Handoko. 2003)

Kerjasama menurut (Harahap. 2007), sering juga di sebut dengan istilah kemitraan, yang berarti suatu strategi kegiatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Sementara (Kusnadi, 2008) mengartikan kerjasama sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang di lakukan secara terpadu yang di arahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Sementara menurut Schiller dan Bryant, kerjasama adalah menggabungkan tenaga sendiri dengan tenaga orang lain untuk bekerja untuk mencapai tujuan umum. (Harahap. 2007)

Menurut Zainudin, Kerjasama ialah seseorang yang mempunyai kepedulian terhadap orang lain atau sekelompok orang hingga terbentuk suatu kegiatan yang sama dan menguntungkan semua anggota dengan dilandasi rasa saling percaya antar anggota serta menjunjung tinggi norma yang berlaku. Kerjasama menurut Zainudin merupakan kerjasama dalam bidang organisasi yang merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama antar anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota organisasi.

Menurut Pamudji, Kerjasama ialah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerjasama hingga tercapai tujuan yang dinamis. Terdapat tiga unsur yang terkandung dalam kerjasama yakni orang yang melakukan kerjasama, adanya interaksi dan adanya tujuan yang sama.

Menurut Thomson Dan Perry, Kerjasama ialah suatu kegiatan yang memiliki tingkatan yang berbeda mulai dari adanya koordinasi dan kooperasi hingga terjadi kolaborasi di dalam suatu kegiatan kerjasama.

Davis (2015), berpendapat bahwa kerjasama adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan kelompok serta menjelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi.

- a) Tanggungjawab adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk menjalankan suatu kewajiban.
- b) Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain.
- c) Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran.

2. **Bencana**

Bencana adalah suatu peristiwa besar atau ekstrim di alam yang berpotensi merugikan kehidupan manusia, harta benda atau aktivitas bila meningkat menjadi bencana atau peristiwa atau kejadian potensial yang merupakan ancaman terhadap kesehatan, keamanan atau kesejahteraan masyarakat atau fungsi ekonomi masyarakat atau kesatuan organisasi pemerintah yang lebih luas. Bencana yang terjadi membawa sebuah konsekuensi untuk mempengaruhi manusia atau

lingkungannya, kerentanannya terhadap bencana dapat disebabkan oleh kurangnya manajemen bencana yang tepat.

Banyak pengertian atau definisi tentang “Bencana” yang pada umumnya merefleksikan karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup manusia, kerusakan pada aspek system pemerintahan ,pembangunan dan lain-lain serta kebutuhan masyarakat yang di akibatkan oleh bencana.

Definisi lain menurut *Internasional Strategi For Disaster Reduction* (UN-ISDR-2002,24) adalah:

“A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of the affected community/ society to cope using its own resources”.

Atau:

“Suatu kejadian yang di sebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga mnyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarkat dengan segala sumber dayanya”.

Berdasarkan definisi bencana dari UN-ISDR sebagaimana di sebutkan di atas, dapat di generalisasikan bahwa untuk dapat di sebut “bencana” harus di penuhi beberapa kriteria/ kondisi sebagai berikut:

1. Ada peristiwa
2. Terjadi karna faktor alam atau ulah manusia
3. Terjadi secara tiba-tiba (Sudden) akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-lahan/bertahap

4. Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda kerugian sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan dan lain-lain
5. Berada di luar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya.

Bencana alam merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga dan diluar jangkauan manusia sehingga peristiwa tersebut dapat menimbulkan banyak kerugian, baik kerugian jiwa-raga, harta benda, maupun kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang di daerah tempat tinggalnya berpotensi terjadi suatu bencana, bukan hanya upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah. (Farichatun Nisa. 2006), Manajemen Penanggulangan Bencana.

Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama melakukan penanggulangan bencana sehingga penanggulangan bencana alam dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pemerintah melakukan penanggulangan bencana melalui tahap response, recovery dan development dimana didalamnya terdapat tindakan evakuasi, penyediaan kebutuhan dasar korban, upaya rekonstruksi dan rehabilitasi, serta perbaikan-perbaikan lain yang juga dimaksudkan sebagai langkah mitigasi bencana. Sedangkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam melalui kerjasama di bidang social dengan pemerintah melalui Badan Penangggulangan Bencana Daerah.

1. Indikator Manajemen Penanggulangan Bencana

Manajemen penanggulangan bencana adalah sebuah proses di mana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil merencanakan dan mengurangi pengaruh bencana mengambil tindakan segera setelah bencana terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk pemulihan, hal ini merupakan hal penting untuk menyikapi dalam pengambilan tindakan dan penyelesaian pasca bencana

Adapun indikator penanggulangan bencana (Nick Carter, 1991)

- a. Response (tanggapan) adalah tindakan yang segera diambil sebelum dan sesudah dampak bencana yang diarahkan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi harta benda, dan yang berurusan dengan gangguan langsung, kerusakan dan efek lainnya yang dikibatkan oleh terjadinya bencana.
- b. Recovery (pemulihan) adalah proses dimana masyarakat dan bangsa dibantu untuk kembali ke fungsi kehidupan seperti sebelumnya setelah bencana kegiatan ini terdiri dari pemberian bantuan terhadap korban bencana baik berupa pemberian materi maupun non materi.
- c. Development (pembangunan) adalah hubungan antara kegiatan yang berhubungan dengan bencana dan pembangunan nasional yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil bencana secara efektif tercermin dalam kebijakan masa depan untuk kepentingan kemajuan nasional.

Menurut Nurjanna, dkk (2010: 56), upaya-upaya penanggulangan bencana, yaitu :

1. Mitigasi

Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam.

2. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman.

Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 yang lalu, menyatakan bahwa “Negara-negara mempunyai tanggungjawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan resiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka”, seperti, Membentuk Tim Penanggulangan Bencana, Memberikan penyuluhan-penyuluhan, Merelokasi korban secara bertahap.

Menurut (Ramli,2010), upaya-upaya pencegahan ancaman alam adalah sebagai berikut :

1. Membuat Pos Peringatan Bencana Salah satu upaya yang kemudian dapat diupayakan adalah dengan mendirikan pos peringatan bencana, pos inilah

yang nantinya menentukan warga masyarakat bisa kembali menempati tempat tinggalnya atau tidak.

2. Membiasakan Hidup Tertib dan Disiplin Perlu pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Asal masyarakat menaatinya, berarti setidaknya kita telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan masyarakat juga harus disiplin.
3. Memberikan Pendidikan tentang Lingkungan Hidup Faktor ini telah dipertegas dalam Konferensi Dunia tentang Langkah Pengurangan Bencana alam, yang diselenggarakan lebih dari dasawarsa silam, 23-27 Mei 1994 di Yokohama, Jepang. Forum ini, pada masa itu merupakan forum terbesar tentang bencana alam yang pernah diselenggarakan sepanjang sejarah. Tercatat lebih dari 5.000 peserta hadir yang berasal dari 148 negara.

Kemudian disini dijelaskan bahwa Dalam penanganan bencana peran masyarakat menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah semata sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Peran masyarakat dalam penanganan bencana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti relawan lapangan dengan menyumbangkan tenaga dengan keahlian

3. Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut (*Asian Disaster Reduction Center, 2003*) yang dikutip (Wijayanto, 2012) Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut, menurut (Parker, 1992) dalam dikutip (Wijayanto, 2012), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) tentang penanggulangan bencana, bencana dikelompokkan kedalam tiga (3) kategori, yaitu :

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (13) tentang Penanggulangan Bencana, Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Sedangkan pada ayat (14), kerentanan terhadap dampak atau resiko/rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Menurut (Paripurno,2011),bahwa sumber ancaman bencana dapat dikelompokkan ke dalam empat sumber ancaman,yaitu :

1. Sumber ancaman Klimatologis, adalah sumber ancaman yang ditimbulkan oleh pengaruh iklim, dapat berupa rendah dan tingginya curah hujan, tinggi dan derasnya ombak di pantai, arah angin, serta beberapa kejadian alam lain yang sangat erat hubungannya dengan iklim dan cuaca. Contoh : banjir, kekeringan, petir, abrasi pantai dan badai.
2. Sumber ancaman Geologis, adalah sumber ancaman yang terjadi oleh adanya dinamika bumi, baik berupa pergerakan lempeng bumi, bentuk dan rupa bumi, jenis dan materi penyusunan bumi, adalah beberapa contoh kondisi dan

dinamika bumi. Contoh : letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor.

3. Sumber ancaman industri dan kegagalan teknologi, adalah sumber ancaman akibat adanya kegagalan teknologi maupun kesalahan pengelolaan suatu proses industri, pembuangan limbah, polusi yang ditimbulkan atau dapat pula akibat proses persiapan produksi. Contoh : kebocoran reaktor nuklir, pencemaran limbah dan semburan lumpur.
4. Faktor manusia juga merupakan salah satu sumber ancaman. Perilaku atau ulah manusia, baik dalam pengelolaan lingkungan, perebutan sumber daya, permasalahan ras dan kepentingan lainnya serta akibat dari sebuah kebijakan yang berdampak pada sebuah komunitas pada dasarnya merupakan sumber ancaman. Contoh : konflik bersenjata dan penggusuran.

Dampak bencana adalah akibat yang timbul dari kejadian bencana. Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur/aset, lingkungan/ekosistem, harta benda, penghidupan, gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi, politik, hasil pembangunan dan dampak lainnya yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya dampak bencana tergantung pada tingkat ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas/kemampuan (*capacity*) untuk menanggulangi bencana. Semakin besar ancaman bencana, maka semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan akibat bencana dan semakin tinggi tingkat kerentanan terhadap bencana, semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan bencana.

Demikian pula, semakin rendah kemampuan dalam menanggulangi bencana, semakin besar peluang dampak yang timbul akibat bencana. Kerentanan dan kapasitas/kemampuan adalah analog dengan dua sisi mata uang. Untuk menurunkan (tingkat) kerentanan dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas/kemampuan. Dengan kata lain, meningkatnya kapasitas/kemampuan akan dapat menurunkan (tingkat) kerentanan (fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan). Besar dampak bencana juga dipengaruhi oleh waktu datangnya kejadian bencana yaitu bencana yang datangnya secara tiba-tiba dan bencana yang terjadi secara perlahan-lahan.

Menurut(Clay.dkk,2004), yang dikutip (Supriyatna,2011), dampak bencana dibagi 3 (tiga) antara lain :

1. Dampak Langsung, meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset ekonomi, misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian dan sebagainya.
2. Dampak tidak langsung, meliputi berhentinya proses produksi, hilangnya output dan sumber penerimaan.
3. Dampak sekunder atau dampak lanjutan (*secondary impact*). Contoh: terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya defisit neraca pembayaran, meningkatnya angka kemiskinan dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengamanatkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana (*Disaster Manangement Paln*).

Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan undang-undang terdiri dari lima sub sistem, yaitu :

a. Legitimasi

Legitimasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat masyarakat/komunitas.

Arti penting legitimasi antara lain :

1. Menyusun rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain.
2. Menempatkan tanggungjawab secara formal sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab dan memberikan perlindungan dari negara/rakyat dari bencana.
3. Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi/lembaga dalam penanggulangan bencana.
4. Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau organisasi/lembaga yang terkena dampak bencana.

b. Kelembagaan

Lembaga bencana dibentuk secara permanen ditingkat pusat dan daerah yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang bersifat koordinasi yang dilakukan pada fase prabencana dan pasca bencana. Sedangkan hubungan secara vertikal bersifat komando di 38 tingkat pusat. Termasuk penerapan *Incident Command System (ICS)* dilokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.

c. Perencanaan

Perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah) dan rencana aksi (nasional/daerah) dalam pengurangan resiko bencana. Perencanaan ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah (sesuai wewenangnya), yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program/kegiatan penanggulangan bencana. Rencana tersebut ditinjau secara berkala oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

d. Pendanaan

Pendanaan penanggulangan bencana berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana, berupa:

1. Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), (APBN/APBD) untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan resiko bencana.
2. Dana Kontinjensi yang digunakan untuk penanganan kesiapsiagaan (sedang diperjuangkan agar penggunaannya didukung dengan kemudahan akses).
3. Dana Siap Pakai untuk bantuan kemanusiaan (*relief*) pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat.
4. Dana pemulihan pasca bencana dialokasikan untuk rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana di daerah.
5. Bantuan masyarakat, bisa berasal dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan bantuan dari dunia usaha/sector swasta sebagai wujud

tanggungjawab sosial, yang didalamnya termasuk untuk penanggulangan bencana.

e. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas berkaitan dengan program/kegiatan meningkatkan/membangun kapasitas bangsa/masyarakat yang memiliki kapasitas untuk tangguh menghadapi ancaman bencana. Sasaran akhirnya adalah masyarakat harus mampu mengantisipasi, siap siaga menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri/keluarga) dan mampu bangkit kembali dari dampak bencana. Banyak program/kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Sosialisasi penanggulangan bencana melalui media massa.
2. Pelatihan manajemen bencana (pencegahan, penanganan dan pemulihan).
3. Kepedulian terhadap cara-cara mitigasi yang dapat diterapkan dan keikutsertaan masyarakat dalam program kesiapan/kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam merespons persoalan bencana di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan program penanggulangan bencana. Secara umum kebijakan nasional penanggulangan bencana dituang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 21 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarnisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya,
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undang

4. Pengertian Longsor

Menurut (Suripin,2002), mendefinisikan gerakan tanah adalah merupakan suatu bentuk erosi di mana pengangkutan atau gerakan massa tanah terjadi pada suatu saat dalam volume yang relatif besar. Ditinjau dari segi gerakannya,maka selain erosi gerakan tanah masi ada beberapa erosi yang di akibatkan oleh gerakan massa tanah,yaitu rayapan (*creep*) runtuhan bantuan (rock fall) dan aliran lumpur (*mud flow*).Karna masa yang bergerak dalam gerakan tanah merupakan massa yang besar maka seringkali kejadian gerakan tanah akan membawa korban, berupa kerusakan lingkungan, lahan pertanian, pemukiman dan infrastruktur serta harta bahkan hilangnya nyawa manusia. (Soedradjat,G M.2008)

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng (Dwiyanto, 2002).

Menurut (Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi bencana geologi,2005) menyatakan bahwa tanah longsor boleh di sebut juga dengan gerakan tanah.Di definisikan sebagai massa tanah atau material campuran lempung,kerikil,pasir,dan kerakal serta bongkahan dan lumpur,yang bergerak sepanjang lereng atau keluar lereng karna faktor gravitasi bumi.

a. Tipe longsor

Menurut (Naryanto, 2002) jenis tanah longsor berdasarkan kecepatan gerakanya dapat di bagi menjadi 5(lima) jenis yaitu:

- 1) Aliran ; longsoran bergerak serentak/ mendadak dengan kecepatan tinggi.
- 2) Longsoran ;material longsoran bergerak lambat dengan bekas longsoran berbentuk tapal kuda.
- 3) Runtuhan; umumnya material longsoran baik berupa batu maupun tanah bergerak cepat sampai sangat cepat pada suatu tebing.
- 4) Majemuk; longsoran yang berkembang dari runtuhan atau longsoran dan berkembang lebih lanjut menjadi aliran.
- 5) Amblesan (penurunan tanah);terjadi pada penambangan bawah tanah, penyedotan air tanah yang berlebihan,proses pengikisan tanah serta pada daerah yang di lakukan proses pemadatan tanah.
- 6) Jenis-Jenis Tanah Longsor
 - a. Longsor Translasi adalah Bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai.
 - b. Longsoran rotasi adalah Bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung.
 - c. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu.
 - d. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng

yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah.

- e. Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah.
- f. Aliran Bahan Rombakan adalah Jenis tanah longsor yang terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter, seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunungapi. Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup banyak.

7) Penyebab Tanah

Longsor Mekar (2014) mengungkapkan faktor penyebab terjadinya longsor pada suatu lereng dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kondisi geologi batuan dan tanah penyusun lereng, kemiringan lereng, hidrologi dan struktur geologi, sedangkan faktor eksternal yang disebut juga sebagai faktor pemicu yaitu curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng serta getran gempa. Pada prinsipnya, tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan

kepadatan tanah, sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban, serta berat jenis tanah/batuan berikut faktor penyebab tanah longsor:

8) Solusi Penanganan Longsor

Solusi penanganan longsor secara umum bertujuan untuk mencegah air agar tidak terkonsentrasi di atas bidang luncur, mengikat massa tanah agar tidak mudah hancur, dan merembeskan air ke lapisan tanah yang lebih dalam dari lapisan kedap (bidang luncur). Dalam merekomendasikan penanganan longsor perlu memperhatikan proses-proses penyebab longsor agar penanganan dapat tepat sasaran, dalam menanggulangi longsor dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara vegetatif dan mekanik (Setyowati, 2010).

9) Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Tanah Longor

Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian, harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat (Rudianto, 2010). Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU RI No.24 Tahun 2007). Termasuk kedalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan dan pelatihan personil.

B. Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat

Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat (Rudianto, 2010). Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU RI No.24 Tahun 2007).

Kesiapsiagaan menurut Dodon (2013) adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Termasuk kedalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan dan pelatihan personil Kesiapsiagaan juga bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk tanggap dalam peristiwa bencana dapat digunakan secara efektif pada saat bencana dan tahu bagaimana menggunakannya (Sutton dan Tierney, 2006).

Kesiapsiagaan adalah kegiatan yang sifatnya perlindungan aktif yang dilakukan pada saat bencana terjadi dan memberikan solusi jangka pendek untuk memberikan dukungan bagi pemulihan jangka panjang (Sutton dan Tierney, 2006).

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan masyarakat di daerah penelitian sudah melakukan persiapan yang cukup baik, berbagai kesiapan yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor sudah dinilai sangat efektif dalam menghadapi bencana tanah longsor. Tingkat kesiapsiagaan

pada masyarakat dinilai sudah tinggi, namun masih perlu diperhatikan dari sebagian masyarakat yang tinggal jauh dari pusat, karena masyarakat yang jauh dari pusat mengaku masih sangat minim mendapat bantuan dari pemerintah, walaupun begitu kesiapsiagaan masyarakat sudah tinggi dalam menghadapi bencana tanah longsor.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat di kabupaten sinjai dapat dikategorikan tinggi dalam menghadapi bencana alam tanah longsor, kesiapan warga menghadapi longsor meliputi tingginya kemampuan mengenali bencana yang berpotensi terjadi di lingkungan tempat tinggal, kemampuan mengenali tanda-tanda akan terjadinya bencana dan kesadaran untuk mengelola lingkungan tempat tinggal yang ramah bencana. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam tanah longsor akan menimbulkan dampak positif yaitu dapat mencegah kerusakan rumah lahan perkebunan jalan dan mengurangi jumlah korban jiwa.

Rahman (2010), berpendapat bahwa tindakan-tindakan mengurangi dampak tanah longsor pada individu dan masyarakat dilakukan dengan informasi dan pendidikan, sehingga untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi tanah longsor akan lebih efektif lewat jalur pendidikan, oleh karena itu pemahaman tentang sumber bahaya dan potensi bencana kepada masyarakat hendaknya diintensifkan dengan diselenggarakannya pendidikan dan latihan, penyebaran brosur, pamflet, sehingga dapat meningkatkan kesadaran publik akan bencana. Implementasi hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran kepala keluarga di rumah masing-masing.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU RI No.24 Tahun 2007). Mengetahui kesiapsiagaan masyarakat. Perda Kabupaten Sinjai No.32 tahun 2013 tentang penanggulangan Bencana Daerah pasal 1 ayat 8 bahwa penanggulangan bencana adalah keseluruhan aspek kebijakan pembanguann yang berisiko bencana.Meliputi kegiatan pada sebelum,saat dan sesudah terjadinya bencana yang mencakup pencegahan bencana,mitigasi,kesiap siagaan, tanggap darurat dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.

C. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan kerjasama SDM dalam Penanggulangan Bencana tanah lonsor

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental yang mendorong seseorang mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja dengan cara selalu mencari perbaikan-perbaikan dan peningkatan, maka ` didalam penanggulangan setiap bencana yang terjadi merupakan salah satu bentuk dari produktivitas kerja dari sumber daya manusia yang ada.

Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja maupun yang berhubungan dengan lingkungan organisasi dan kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Menurut Balai Pengembangan Produktivitas Daerah terdapat beberapa faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja antara lain sikap, motivasi, disiplin, etika, pendidikan, keterampilan, manajemen dan sistem organisasi, tingkat

penghasilan, gizi dan kesehatan, jaminan sosial, lingkungan dan iklim kerja, sarana dan teknologi (Sedarmayanti, 2009).

Terkait dengan penelitian ini, maka faktor-faktor yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana akibat tanah longsor terdiri dari dua faktor yaitu faktor Individu dan faktor organisasi. Faktor individu mencakup pelatihan, keterampilan, serta usia. Sedangkan faktor organisasi meliputi perumusan kebijakan, koordinasi atau pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi yang terkait dan pemberdayaan masyarakat.

1. Umur

Umur harus mendapat perhatian karena mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja dan tanggung jawab seseorang, umur muda umumnya mempunyai fisik yang lebih kuat, dinamis, dan kreatif, tapi cepat bosan, kurang bertanggung jawab, cenderung absen dan turnovernya tinggi. Sedangkan umurnya yang lebih tua kondisi fisiknya kurang, tetapi bekerja ulet, tanggung jawabnya besar serta absensi dan turnovernya rendah (Hasibuan, 2008). Makin tua akan makin kecil kemungkinan berhenti dari pekerjaan. Pekerja yang lebih tua kecil kemungkinan akan berhenti karena masa kerja mereka yang lebih panjang cenderung memberikan kepada mereka tingkat upah yang lebih tinggi, dan tujangan pensiun yang lebih menarik (Robbins, 1996).

Menurut Tiffin dan Cormick, seperti yang dikutip Sutrisno, 2009, menjelaskan bahwa produktivitas kerja dipengaruhi oleh faktor yang ada pada diri individu antara lain dan kondisi fisik individu.

Produktivitas seseorang dipengaruhi dengan faktor usianya. Seseorang yang usia muda mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, bergerak lincah, giat berkegiatan, kesemuanya ini didorong oleh intensitas kerja organ-organ di dalam tubuhnya yang masi besar dan cepat, kondisi fisik merupakan faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas (Paul Mali dalam Yuniarsih, 2008).

Teori yang juga dikemukakan oleh Siagian, 1995, yang mengatakan bahwa semakin meningkatnya usia seseorang maka kedewasaan teknik dan psikologinya semakin meningkat, ia akan mampu mengambil keputusan, semakin bijaksana, semakin mampu berpikir secara rasional, mengendalikan emosi dan toleran terhadap pendapat orang lain.

Menurut Sedarmayanti, 2009 bahwa umur seseorang sebanding lansung dengan kapasitas fisik sampai batas tertentu dan mencapai puncaknya pada umur 25 tahun. Pada umur 50-60 tahun kekuatan otot menurun sebanyak 60%, selanjutnya kemampuan fisik seseorang yang berumur lebih dari 60 tahun tinggal mencapai 50% dari orang yang berumur 25 tahun. Perbedaan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa produktivitas seseorang dapat dipengaruhi banyak faktor, sehingga faktor umur tidak akan selalu mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia.

2. Keterampilan

Keterampilan adalah kemampuan dan penguasaan tehnik operasional mengenai bidang tertentu, yang bersifat kekaryaan, keterampilan diperoleh melalui proses belajar dan berlatih. Keterampilan berhubungan dengan

kemampuan seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknik, seperti keterampilan mengoperasikan perahu karet, keterampilan mengoperasikan rumah sakit lapangan, dan lain-lain. Dengan keterampilan yang dimiliki seseorang sumber daya manusia diharapkan menyelesaikan pekerjaan secara produktif (Sedarmayanti, 2009; Sulistiani, 2003; Yuniarsih, 2008).

Sikap dan mental dan keterampilan sangat besar perannya dalam meningkatkan produktivitas, oleh sebab itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memantapkan sikap mental serta meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, guna mewujudkan produktifitas kerja (Sedarmayanti, 2009).

Menurut Sustermeister dalam kutipan Sedarmayanti, 2009, bahwa pada aspek tertentu apabila sumber daya manusia semakin terampil, maka akan lebih mampu bekerja menggunakan fasilitas kerja dengan baik. Sumber daya manusia tersebut akan menjadi lebih terampil apabila mempunyai kecakapan (*ability*) dan pengalaman (*experience*) yang cukup.

3. Pelatihan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diupayakan melalui dua aspek yaitu aspek fisik dan non fisik. Untuk menentukan kualitas fisik dapat diupayakan melalui peningkatan kesehatan dan gizi, sedangkan untuk meningkatkan kualitas non fisik diperlukan upaya pendidikan dan pelatihan (Sutermeister dalam Sedarmayanti, 2009). Pelatihan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan bagi sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang

melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pelatihan mempunyai fokus untuk memberikan mamfaat bagi organisasi secara cepat (Simamora, 2006). Menurut Jan Bella dalam Hasibuan, 2008, mengemukakan bahwa pelatihan merupakan proses pengembangan dengan meningkatkan keterampilan kerja baik tehnik maupun manajerial dalam pelaksanaan pekerjaan sumber daya manusia, latihan berorientasi pada praktek, dilakukan dilapangan, berlangsung singkat, dan biasanya menjawab *how*. Pelatihan yang merupakan proses pengembangan tersebut akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena *technical skill*, *human skill*, dan *managerial skill* nya makin baik (Hasibuan, 2008). Dengan demikian semakin baik keterampilan, keahlian, disiplin, ketekunan, ketepatan menggunakan metode serta alat-alat lain dalam bekerja.Maka semakin tinggi pula produktivitas kerjanya (Yuarniasih, 2008).

Kegiatan pelatihan mempunyai tujuan tertentu, ialah untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta yang menimbulkan perubahan prilaku aspek-aspek kognitif, keterampilan dan sikap.Perbaikan dan peningkatan prilaku kerja bagi tenaga kerja sangat diperlukan agar lebih mampu melakukan tugas-tugasnya dan diharapkan lebih berhasil dalam upaya pelaksanaan program kerja organisasi/lembaga.Prilaku yang perlu diperbaiki atau dikembangkan meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepribadian yang dituntut tugas pekerjaannya (Hamalik, 2007).

Untuk melakukan perubahan-perubahan pada suatu organisasi, memerlukan pendidikan dan pelatihan yang merupakan penting bagi organisasi, organisasi membutuhkan orang-orang yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan jabatan. Untuk dapat melaksanakan itu maka orang tersebut memerlukan pengetahuan dan keterampilan bagaimana melaksanakan tugas tersebut. Melalui pendidikan dan pelatihan, diharapkan kebutuhan dan kekurangan dapat dipenuhi. Sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat dan benar (Atmodiworo, 2002).

Latihan kerja yang dimaksudkan untuk melengkapi sumber daya manusia dengan keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja, untuk itu latihan kerja diperlukan untuk pelengkap sekaligus memberikan dasar-dasar pengetahuan. Karena dengan latihan berarti sumber daya manusia belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan benar dan tepat, serta dapat memperkecil atau meninggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Stoner yang dikutip oleh Sutrisno, 2009, peningkatan kapasitas bukan pada pemuktahiran peralatan, akan tetapi pada pengembangan sumber daya manusia yang utama. Dari hasil penelitian beliau mengatakan, 75% peningkatan produktivitas justru dihasilkan oleh perbaikan pelatihan dan pengetahuan kerja.

D. kerangka pikir

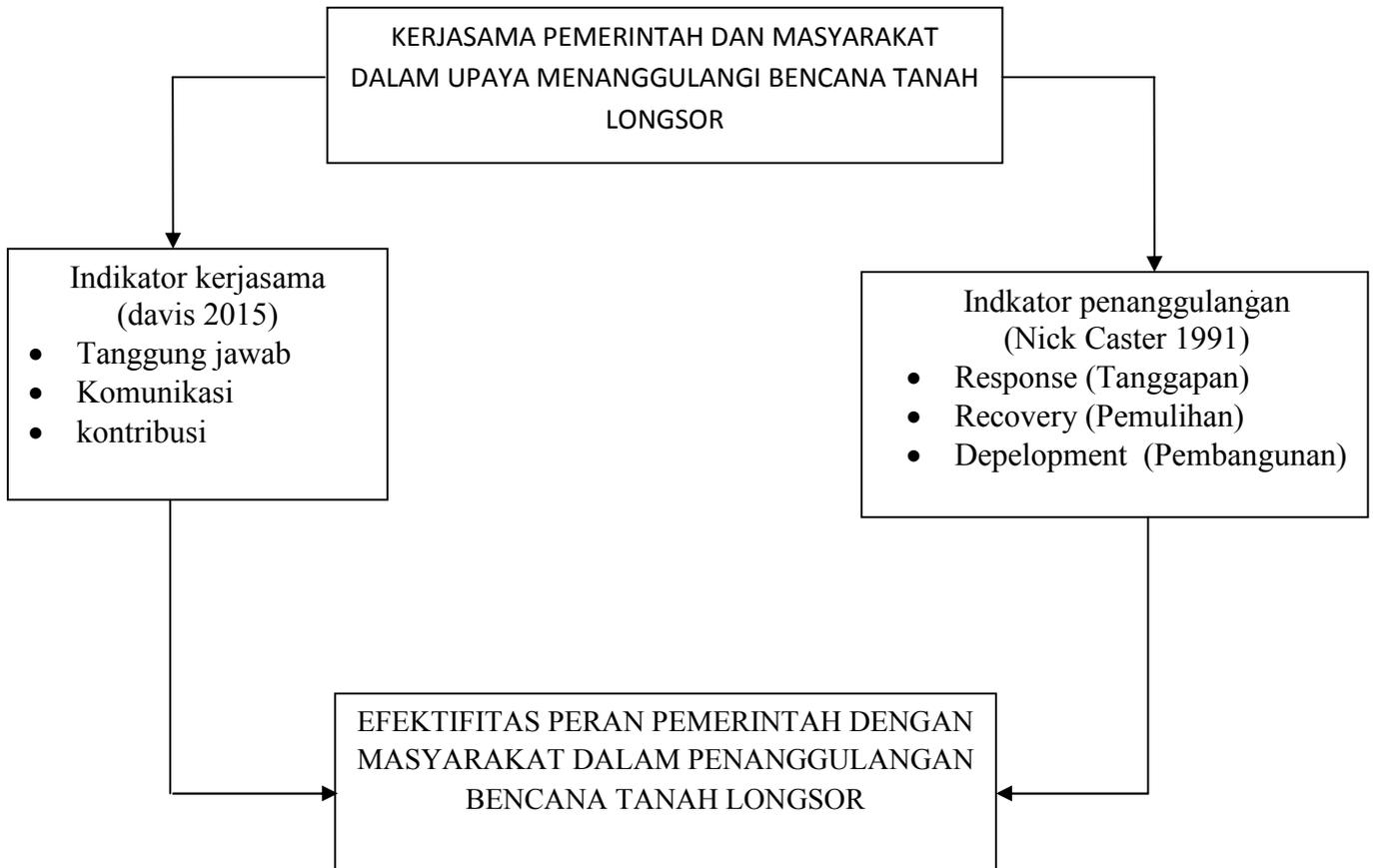
Berdasarkan pemaparan di atas maka kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sinjai menjadi hal yang sangat penting

Kinerja pemerintah daerah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu daerah maupun instansi tertentu. Oleh karena itu, satuan unit yang bekerja khusus dalam bidang pekerjaan tertentu seperti penanggulangan bencana alam harus bekerja dengan disiplin, efisien dan efektif.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil apabila telah bekerja dan dirasakan kinerjanya oleh masyarakat yang ada di daerahnya.

Tidak terlepas dari itu penulis dalam penelitian ini, ingin mengungkapkan secara pasti apa yang mengakibatkan sering terjadi bencana tanah longsor, maka dari itu peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut.

Bagan Kerangka Konsep



E. Fokus penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam upaya menanggulangi dampak dari bencana alam baik sebelum dan sesudahnya terjadi bencana agar dapat meminimalisir efek yang ditimbulkan.

F. Deskripsi fokus penelitian

Berdasarkan kerangka fikir di atas deskripsi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat dalam Upaya Menanggulangi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

1. Indikator penanggulangan bencana

- a. Response (tanggapan) adalah tindakan yang segera diambil sebelum dan sesudah dampak bencana yang diarahkan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi harta benda, dan yang berurusan dengan gangguan langsung, kerusakan dan efek lain yang dikibatkan oleh terjadinya bencana.
- b. Recovery (pemulihan) adalah proses dimana masyarakat dan bangsa dibantu untuk kembali ke fungsi kehidupan seperti sebelumnya setelah bencana kegiatan ini terdiri dari pemberian bantuan terhadap korban bencana baik berupa pemberian materi maupu non materi
- c. Development (pembangunan) adalah hubungan antara kegiatan yang berhubungandengan bencana dan pembangunan nasional yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil bencana secara efektif tercermin dalam kebijakan masa depan untuk kepentingan kemajuan nasional.

2. Indikator kerjasama

- a. Taggungjawab adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk menjalankan suatu kewajiban
- b. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepihak lain
- c. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga mapun pikiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini sudah di laksanakan selama 2 bulan.. Lokasi penelitian di lakukan di wilayah kabupaten Sinjai di kantor dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan alasan untuk mengetahui bagaimana kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Masyarakat dalam upaya menanggulangi bencana tanah longsor di kabupaten Sinjai.

Alasan lain di pilih sebagai tempat penelitian karena dilihat dari letak geografisnya yang memang daerah tersebut rawan bencana, seperti rumah penduduk yang berada di kaki tebing sehingga bagaimana hal tersebut menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat sehingga pada saat terjadi bencana dikemudian hari dapat di minimalisir resiko jatuhnya korban,rusaknya fasilitas umum (bangunan sekolah,masjid dan akses jalan,) dan rusaknya lahan pertanian sehingga menghambat siklus perekonomian masyarakat.

B. Jenis dan Tipe penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data diskriptif dari hasil wawancara dan observasi terhadap pelaku yang dapat diamati.

a. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang dilakukan adalah fenomenologi yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek penelitian, berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau sebagaimana adanya.

C. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis dan hasil wawancara yang terdiri dari beberapa informan, serta dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis yang bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan obyek penelitian yang bersumber dari buku bacaan dan internet.

D. Informan Penelitian

Obyek utama penelitian ini ialah Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang kemudian disebut sebagai informan. Informan yang dimaksud adalah Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), serta masyarakat itu sendiri yang terkena dampak maupun yang tidak dari adanya bencana alam tersebut.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

NO	INFORMAN	INISIAL INFORMAN	JABATAN
1.	Drs. A. Junaedi Mustafa	AJM	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sinjai
2.	Burhan Syamsuddin, SE	BSY	Sub. Bagian program data dan evaluasi BPBD Kabupaten Sinjai
3.	Syafruddin, SP	SYF	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sinjai
4.	Achmad Karim	AKR	Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sinjai
5.	Setiawati Jufri, S.sos.,M.Si	SJF	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sinjai
6.	Hasan	HSN	Tokoh Masyarakat
7.	Suardih	SRH	Masyarakat Yang Terkena Bencana
8.	Kahar	KHR	Tokoh Masyarakat
9.	Sakka	SKA	Masyarakat Yang Terkena Bencana
10.	Hasnia	HAS	Masyarakat Yang Terkena Bencana
11.	Nadir	NDR	Masyarakat Yang Terkena Bencana
JUMLAH INFORMAN			11 (orang)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data untuk mengadakan wawancara secara langsung terhadap informan yang dianggap dapat memberikan keterangan-keterangan yang lebih lengkap, Serta mampu membahas dengan tuntas tentang permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dengan menggunakan wawancara yakni komunikasi verbal dengan informan berkaitan dengan substansi peneliti

Dalam Penelitian ini, metode wawancara yang di pergunakan adalah wawancara yang mendalam (indepth interview) di mana informannya telah mengetahui maksud dan tujuan peneliti secara garis besar dan sifatnya tidak mengikat.

2. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan jalan mengamati fenomena secara langsung.

3. Dokumentasi

Yaitu Melalui teknik ini penulis mengumpulkan dan mencari data dengan melalui dokumen atau catatan yang diperlukan dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

1. Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul. Data lapangan yang demikian banyak tersebut selanjutnya dipilih berdasarkan tema atau variabel yang telah ditetapkan.

2. Tahap Penyiapan Data

Pada tahap ini, data yang telah dibuat ringkasannya dalam bentuk abstraksi dimana peneliti kemudian mengembangkannya melalui bentuk teks naratif.

3. Tahap Kesimpulan

Pada tahap ini, Peneliti melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Hasil klarifikasi data inilah yang kemudian di interpretasi dalam bentuk narasi.

G. Keabsahan Data

Setelah menganalisis data, peneliti harus memastikan apakah interpretasi dan temuan penelitian akurat. Validasi temuan berarti bahwa peneliti menentukan keakuratan dan kredibilitas temuan melalui beberapa strategi, antara lain; *Kredibilitas, Transferabilitas, Konfirmabilitas, Defendabilitas.*

1. Kredibilitas, Merupakan pendapatan hasil penelitian kualitatif yang kredibel/dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut.
2. Transferabilitas, Merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif untuk dapat ditransfer pada konteks/setting yang lain dari sebuah perspektif kualitatif transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi.
3. Konfirmabilitas, Merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi pada orang lain.
4. Defendabilitas, Perlunya untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab

menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan peneliti dalam studi tersebut.

Selain itu, salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian ini adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut (Sugiyono,2002), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Menurut Sugiyono ada 3 macam triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepala sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau koesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang

bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya yang berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Obyek Penelitian

1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sinjai terletak di jazirah selatan bagian timur propinsi Sulawesi selatan dengan ibu kota sinjai. Berada pada posisi 50 19'30" sampai 50 36'47" lintang selatan dan 1190 48'30" sampai 1200 0'0" bujur timur.

Kabupaten Sinjai terletak di bagian pantai timur Propinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 223 km dari kota Makassar. Posisi wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bone (bagian Utara), Teluk. Bone (bagian Timur), Kabupaten Bulukumba (di bagian Selatan) dan Kabupaten Gowa (di bagian Barat). Luas wilayahnya sekitar 819,96 km² (81.996 ha).

Berdasarkan situasi Geografis, daerah kabupaten Sinjai beriklim Sub Tropis. Curah hujan rata rata 2.772 sampai 4.847 milimeter dengan 120 Deep rain pertahun. Musim hujan di mulai Februari sampai dengan Juli dan musim panas mulai Agustus sampai dengan Oktober serta kelembaban mulai November sampai dengan Januari. Sinjai berada pada ketinggian antara 25 sampai 1.000 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 (sembilan) kecamatan, 13 kelurahan dan 67 desa, yaitu:

Tabel 4.1. Jumlah kecamatan, kelurahan dan Desa di kabupaten Sinjai

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	sinjai utara	5	-
2	sinjai timur	1	10
3	sinjai tengah	1	10
4	Sinjai barat	1	8
5	Sinjai selatan	1	10
6	Sinjai borong	1	7
7	Bulupoddo	-	7
8	Tellulimpoe	1	10
9	Pulau sembilang	-	4
Jumlah		11	66

Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak antara 5°2'56" sampai 5°21'16" Lintang Selatan (LS) dan antara 119°56'30" sampai 120°25'33" Bujur Timur (BT). Secara administrasi, batas-batas wilayah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Secara Morfologi, daerah ini lebih dari 55,5% terdiri dari daerah dataran tinggi (100-500 mdpl). Secara Klimatologi terletak pada posisi iklim musim timur

dimana bulan basah jatuh antara bulan April sampai Oktober dan bulan kering antara Oktober sampai April. Secara ekonomi, daerah ini memiliki letak strategis karena memiliki dua jalur perhubungan, yaitu darat dan laut. Jalur darat menghubungkan kota-kota kabupaten atau kota provinsi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sedangkan jalur laut digunakan untuk hubungan antar daerah di luar Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai

➤ Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.
13. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.

a) Susunan Organisasi

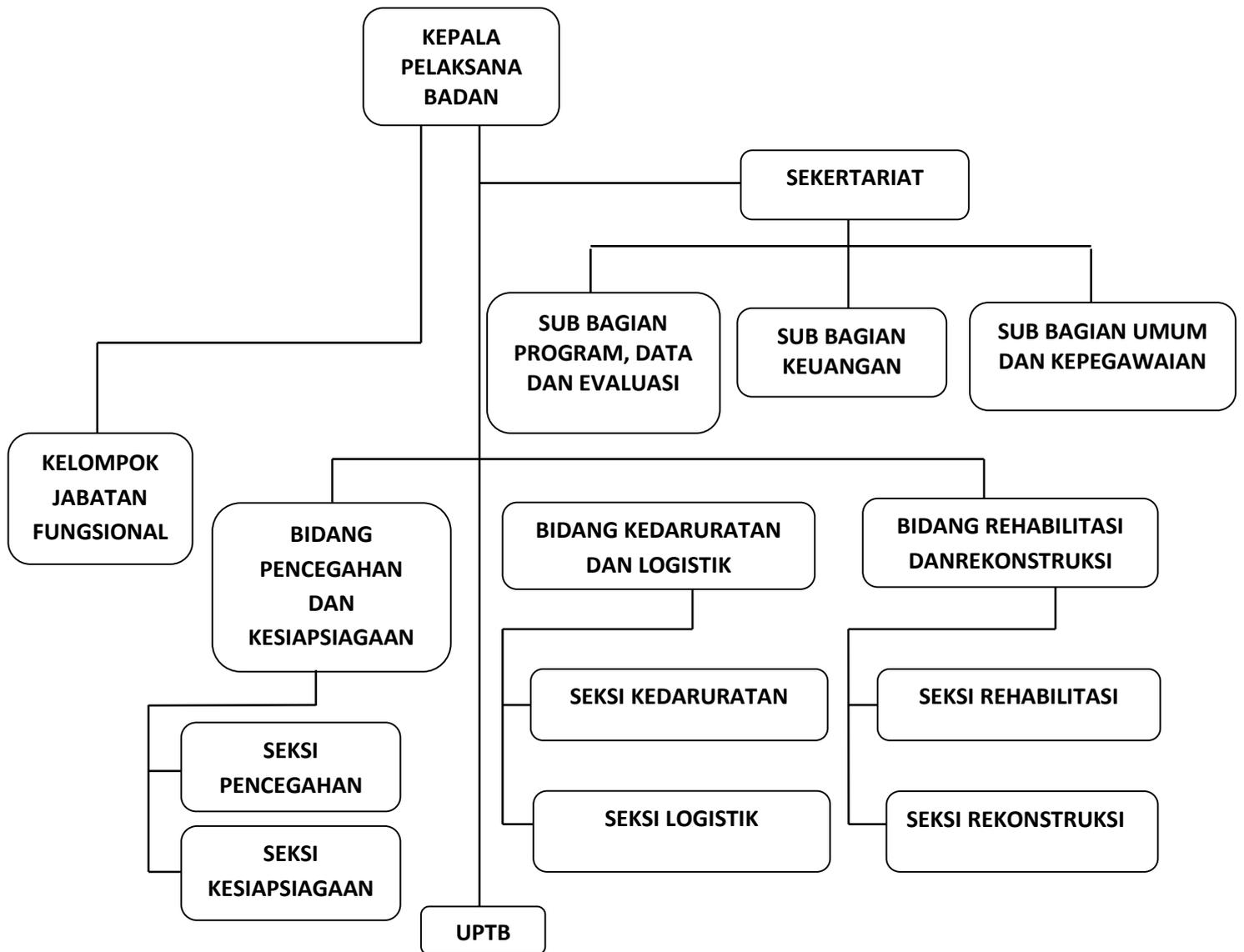
Berdasarkan Perda Kabupaten Sinjai Nomor 32 Tahun 2012 Pasal 2 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah susunan organisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pegawai Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

No	Nama Pegawai	Jabatan
1	Drs. A. Junaedi Mustafa	Ketua
2	Muhammad Asdar,SH	Sekretariat
3	Burham Syamsuddin,Se	Sub.data dan Evakuasi
4	Sukmawati,S.sos	Sub. Bagian Keuangan
5	Bachtiar Basri,S. Sos	Sub.Umum dan Kepegawaian
6	Fajrianto Ramli,Se	Anggota
7	Murniati	Anggota
8	Setiawati Jufri,Sos, M.Si	Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
9	Andi Octave Amier, S.Ip	Seksi pencegahan
10	Makmur,S.Sos	Seksi kesiapsiagaan
11	Nofa Ismanto,S.Sos	Anggota
12	Sukaenah,SH	Anggota
13	Achmad Karim	Bidang kedaruratan dan logistic
14	Akrim Hamra,S.Pi	Seksi kedaruratan
15	Drs. Muhtar	Seksi logistic
16	Aksah,S.Pdi	Anggota
17	Andi Fathur Fakhri	Anggota
18	Syafruddin,Sp	Bidang rehabilitas dan rekonstruksi
19	Alimin D,S.St	Seksi rehabilitas
20	H.Mahmud, S.Sos	Seksi rekonstruksi
21	Muh. Iskhak,S.Sos	Anggota
22	Dahlia	Anggota

Sumber Data : Kantor BPBD

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai dapat disajikan sebagai berikut.



3. Deskripsi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai

a. Sejarah singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sebagai penjaaran dari amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

b. Tugas, Fungsi, dan visi misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai

2. Tugas

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadikewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Rincian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanggulangan bencana.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

3. Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanggulangan bencana.
3. Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana.
4. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan.
5. Melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana

c. Visi Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai

1. Visi

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Sinjai adalah “*Ketangguhan Sinjai Bersatu Menghadapi Bencana*”

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuapten Sinjai dalam mengupayakan usaha penanggulangan bencana tetap melibatkan masyarakat. Sebab, masyarakatlah yang berhadapan dan merasakan langsung dampak bencana. Oleh karena itu, sangat penting membangun ketangguhan masyarakat Kabupaten Sinjai terhadap bencana.

ketangguhan masyarakat terhadap bencana ditunjukkan oleh kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi, menahan, beradaptasi, dan memulihkan. Ketangguhan merupakan kebalikan dari kerentanan, di mana kedua konsep tersebut laksana dua sisi mata uang.

2. Misi

Dalam melaksanakan visi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai maka dijabarkan dalam 3 misi yaitu:

1. Melindungi masyarakat dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana di segala aspek.
2. Membangun Sistem dan penguatan kapasitas Penanggulangan Bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

B. Data Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai

Data Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai Dari Tahun 2013

Sampai 2017

Tabel 4.3 Data bencana tanah longsor kabupaten Sinjai

No	Tahun	Kecamatan	Kerugian orang (Meninggal/ Hilang)	Lain-lain
1	2013	Sinjai barat	-	1 tempat ibadah, 1 unit rumah RB (rusak berat)
2	2013	Pulau sembilang	3 orang luka luka	1 unit rumah RB
3	2014	Sinjai selatan	-	10 km jalan, 2 unit rumah RR, 750 Ha Sawah
4	2014	Sinjai barat	-	2 unit rumah RB, 25 KM jalan, 105 M saluran irigasi, 875 M kebun
5	2014	Bulupoddo	-	3 rumah RB, 25 km jalan, 205 m jalan, 451 Ha sawah, 210 m saluran irigasi, 427 Ha kebun
6	2014	Sinjai Borong	-	1 unit rumah RR (rusak ringan)
7	2015	Tellulimpoe	-	2 unit jembatan, 50 M jalana
8	2016	Sinjai selatan	-	1 unit rumah RR
9	2015	Sinjai timur	-	1 unit rumah RB
10	2015	Sinjai utara	-	25 M jalan
11	2016	Sinjai timur	-	0,5 M jalan
12	2016	Sinjai selatan	-	1 rumah RB, 0,7 M Jalan
13	2016	Bulupoddo	-	0,5 M jalan
14	2017	Sinjai barat	-	200 M Jalan
15	2017	Sinjai timur	-	10 M Jalan
16	2017	Sinjai selatan	-	4 sekolah
17	2017	Tellulimpoe	-	2 unit rumah RB
18	2017	Bulupoddo	-	7 M jalan
19	2017	Sinjai Barat	-	1 unit rumah RB (rusak berat)

Sumber: Data Bencana BPBD 2015-2017

C. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ditingkat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 (BNPB, 2008).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki visi untuk terselenggaranya perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan yang dimaksud berdasarkan kemanusiaan, keadilan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, cepat, tepat, transparan dan akuntabilitas dengan membangun partisipasi dan kemitraan publik (Pristiyanto, 2009).

a. Visi Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Misi BPBD adalah :

1. Meningkatkan kemampuan SDM (aparatur dan masyarakat) untuk menunjang penguasaan teknologi dalam bidang penanggulangan bencana.
2. Menetapkan standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Mengembangkan pemamfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

5. Memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standart pelayanan minimum, serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.
6. Mengembangkan, meningkatkan dan menggaling kemitraan dengan masyarakat dibidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

D. Kerja Sama Masyarakat dan BPBD Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai

Dalam menanggulangi atau mengurangi resiko bencana, tidak cukup jika hanya dilakukan oleh suatu kelompok saja. Namun juga di butuhkan kerjasama dan keterlibatan proaktif dari berbagai pihak, baik itu pada pemerintah, kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat sipil. Selain itu, dibutuhkan pula manajemen bencana yang baik dari kerjasama banyak pihak tersebut. Jika kerjasamanya berjalan dengan baik, maka manajemen bencananya juga akan berjalan dengan baik dan sukses mengurangi resiko bencana (Johan Minnie, 2010).

a. Tanggungjawab

1. Response (Tanggapan)

Secara umum tindakan respon sudah di lakukan oleh BPBD dan Masyarakat yang mempunya masing masing tanggung jawab di lapangan sesuai denga teori. Tetapi penenkanan tindakan respon tersebut setelah bencana terjadi yang secara teori memang terbukti bahwa tindakan respon ini di lakukan pada saat mendesak setelah ada kejadian bencana.

wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

“Setelah di lapangan kami dengan instansi/dinas terkait seperti Damkar, PU, Dinsos, Dinkes dan seluruh Instansi/dinas terkait langsung menjalankan tugas masing masing sesuai dengan perencanaan, bahkan kelompok peduli lingkungan seperti pramuka dan Mapala ikut berpartisipasi untuk bantuan dalam mensuplai logistik berupa sandang, pangan dan papan”. (AJM 50 tahun 18/10/2017)

Dari pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa ketika berada di lokasi pemerintah saling bekerjasama dengan instansi/dinas terkait untuk membantu proses rehabilitas para korban yang terkena dampak bencana agar mereka langsung di beri bantuan.

Wawancara dengan salah satu anggota BPBD kabupaten Sinjai sebagai berikut:

“ Yang bisa kita selesaikan secara langsung yang menggunakan tenaga manusia kita selesaikan dengan menggunakan alat sederhana saja seperti cangkul,skup, dan jaring2 sampah, kita juga di bantu oleh personil Damkar serta beberapa instansi lainnya, akan tetapi dengan kerusakan yang sudah parah dan tidak bisah di tangani dengan peralatan warga seadaanya maka harus menurunkan alat berat dari dinas PU”.(SYF 45 tahun 18/10/2017)

Dari penuturan diatas mengemukakan bahwa dalam melakukan eksekusi di wilayah yang terkena bencana ada bermacam-macam kriteria kerusakan yang di timbulkan oleh bencana tanah longsor. Untuk kerusakan ringan, penangananya juga bisa di selesaikan hanya dengan menggunakan tenaga untuk mengevakuasi wilayah yang terkena bencana, ada juga yang harus menggunakan alat berat, karna tidak memungkinkan untuk memakai alat seadaanya sehingga membutuhkan tenaga ahli demi membantu proses penanganan korban.

Kemudian lebih lanjut dikemukakan oleh salah satu masyarakat yang terkena bencana tanah longsor sebagai berikut:

“Kami masyarakat disini saling bahu membahu dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terkena bencana tanah longsor dengan melakukan pembersihan sisa-sisa lumpur yang diakibatkan oleh bencana tanah longsor.” (hasil wawancara SKA 50 tahun 18/10/ 2017).

Dari pernyataan informan di atas mengungkapkan bahwa kearifan yang di miliki oleh masyarakat setempat yang peduli dan saling tolong menolong dalam melakukan pembenahan dan pembersihan sisah lumpur yang diakibat oleh tanah longsor adanya rasa toleransi yang harus di miliki setiap masyarakat yang peduli akan sesame manusia.

2. Recovery (Pemulihan)

Wawancara dengan kepala badan pelaksana BPBD kabupaten sinjai sebgai berikut:

“Masyarakat yang terkena bencana tanah longsor terkadang ada yang mengalami traumatis atau depresi dari peristiwa tersebut, sehingga kami dari pihak pemerintah sendiri telah bekerjasama dengan Dinkes (Psikolog) untuk membantu mereka mengatasi masalah psikologis akibat bencana tersebut. Biasanya sekitar 10-20 % akan memerlukan perawatan kesehatan mental khusus”. (AJM 50 tahun 18/10/2017)

Pernyataan informan di atas bahwa tidak sedikit masyarakat atau korban bencana yang mengalami trauma dari peristiwa tanah longsor sehingga bagaimana pihak pemerintah bekerjasama dan bertanggungjawab dengan dinas kesehatan dalam proses pemulihan psikolog.

Lebih lanjut di kemukakan oleh salah satu anggota BPBD Kabupaten Sinjai:

“Dalam melakukan tahap pemulihan pada orang terkena bencana atau peristiwa troumatik adalah dengan mengurangi tekanan awal seperti mempromosikan tentang keamanan dan keselamatan, menyediakan relawan atau pekerja sosial yang bertugas untuk mendengarkan korban yang ingin

berbagi cerita dan emosi mereka, menghadirkan Ulama atau Ustadz dalam memberikan pencerahan, serta membantu korban dalam berkomunikasi dengan keluarga, teman dan orang-orang yang dicintainya”. (MAS 40 tahun 18/10/2017)

Dari penuturan di atas mengemukakan bahwa dalam tahap pemulihan terhadap korban bencana tanah longsor mengalami tekanan mental atau depresi, pemerintah melakukan beberapa upaya yang dapat membantu korban tersebut kembali ke fungsi semula seperti dengan melibatkan pekerja sosial, serta Ulama atau Ustadz.

Wawancara dengan salah satu masyarakat:

“Kami bersama warga yang lain membantu membenahi fasilitas yang rusak akibat tanah longsor, seperti rumah warga, jalan, dan sebagainya sehingga dapat di gunakan kembali setelah terjadi longsor sehingga tidak butuh waktu lama untuk bangkit kembali”. (SKA 50 tahun 21/10/2017)

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas mengungkapkan kerjasama masyarakat membangun fasilitas yang rusak sehingga dapat di gunakan kembali. Pemulihan darurat dengan operasi tanggap darurat pada aspek pemulihan darurat berupa perbaikan prasarana vital: seperti jalan. Hal ini dapat di lakukan sejak sesaat setelah kejadian bencana. tujuannya adalah untuk mempercepat normalisasi kehidupan sosial ekonomi, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-harinya.

3. Development

Untuk mempermudah analisis, dalam tahap development ini peneliti juga membagi tindakan development berdasarkan sifatnya, yaitu struktural dan nonstruktural seperti yang dilakukan pada tindakan mitigasi bencana. Secara struktural dilakukan melalui upaya teknis, baik secara alami maupun buatan

mengenai sarana dan prasarana. Sedangkan non struktural adalah upaya non teknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya struktural maupun upaya lainnya.. Hal tersebut dikarenakan tindakan yang seharusnya dilakukan dalam upaya developmenttelah dilakukan, seperti memperkenalkan program dan sistem bangunan yang diperbaiki dan dimodernisasi, serta menerapkan peristiwa bencana dalam program penelitiaan pengembangan di masa depan.

Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat sebagai berikut:

“pemerintah sudah bergerak dalam melakukan proses pencegahan dini dengan memasang pondasi yang menurut kami para warga sekitar merupakan daerah paling rawan terhadap terjadinya tanah longsor.” (hasil wawancara, KHR 38 tahun 20/10/2017).

Berdasarkan penuturan dari informan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sudah ada bentuk kerja sama dari pemerintah dan masyarakat setempat dalam mecegah resiko dari bencana tanah longsor sedini mungkin dengan adanya pembangunan pondasi di tebing-tebing terjal dan berpotensi terjadiya tanah longsor.

Lebih lanjut wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

“Iya, kami sangat berterima kasih atas sumbangan tenaga dari masyarakat yang sudah peran aktif masyarakat dalam pembangunan tersebut.”(hasil wawancara, AJM 55 tahun 19/10/2017).

Dari wawancara dengan informan tersebut mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), membutuhkan keterlibatan

masyarakat. Apalagi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di zaman modern sekarang semakin sulit karena nilai kerjasama, gotong royong dan berbagai kearifan lokasi dalam makin terkikis.

b. Komunikasi

1. Response (Tanggapan)

Wawancara dengan kepala dinas BPBD Kabupaten Sinjai :

“ Alhamdulillah selama ini bagus, karna sudah jauh sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi pemahaman tentang kebencanaan dan pada saat terjadi bencana. Alhamdulillah masyarakat juga dengan pemerintah setempat membantu keluarga yang terkena bencana.” (hasil wawancara, AJM 55 tahun 23/10/2017)

Dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa masyarakat yang ada di sekitar daerah rawan longsor telah bekerjasama dengan baik ini terlihat ketika terjadi bencana masyarakat bersama pemerintah bahu membahu membantu warga lain yang terkena bencana, dimana bekal tersebut di dapat dari hasil sosialisasi pemerintah untuk mengantisipasi datangnya bencana sehingga ketika terjadi bencana masyarakat sudah tahu langkah yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri sampai menolong warga lain yang terkena dampak bencana.

Wawancara dengan salah satu masyarakat sebagai berikut :

“kami disini selalu dibekali pengetahuan dan juga peringatan ketika akan memasuki musim hujan kami diminta untuk selalu waspada khususnya untuk yang tinggal di lereng perbukitan” (hasil wawancara NDR 32 tahun 21/10/2017)

Dari penuturan diatas dalam mengindikasikan bahwa masyarakat telah menerima dengan baik pengetahuan dan himbauan yang disosialisasikan oleh

pemerintah sehingga masyarakat telah mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi.

Wawancara dengan salah satu masyarakat, sebagai berikut:

“Saya sangat bersyukur karena kita sudah mngantisipasi meski ketiks terjadi bencana alam ada himbauan dari pemerintah setempat,akan tetapi masyarakat sudah tahu apa yang di lakukan dari bekal yang mereka dapat sebelumnya”. (Wawancara FDH 58 tahun 06/07/2017)

Dari penuturan salah satu masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mengantisipasi bencana tanpa menunggu instruksi dari pemerintah ketika terjadi darurat sehingga masyarakat tidak tergesah gesah karena sudah ada bekal sebelumny. Sehingga pemerintah dapat di katakana telah berhasil dalam memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan kerugian dan sumber daya penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena longsor.

2.Recovery (Pemulihan)

Secara umum tindakan recovery yang di lakukan sudah sesuai dengan teori karena tujuan dari tindakan tersebut sudah tercapai yakni mengembalikan fungsi bangunan-bangunan yang rusak akibat bencana. Walaupun tindakan recovery yang di lakukan hanya sebatas pada tindakan restorasi dan rekonstruksi sudah beberapa kali di lakukan perbaikan karena kabupaten sinjai daerah rawan bencana.

Wawancara dengan salah satu anggota BPBD kabupaten Sinjai :

“Dalam rangka menyiapkan masyarakat menghadapi bencana untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor maka bersama sama dengan masyarakat dilakuka pertemuan pertemuan formal yang mana kita

mengakomodasi materi tentang kebencanaan/penanggulangan bencana khususnya masalah kedaruratan bencana, termasuk melakukan pelatihan dalam wilayah yang masuk daerah rawan bencana yg diberikan oleh BPBD atau Damkar”. (hasil wawancara MAS 40 tahun 25/10/2017)

Dari pernyataan informan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam rangka menghadapi bencana alam perlu dilakukan pendidikan dini tentang tanggap darurat serta pelatihan pelatihan sehingga senantiasa memberikan manfaat yang tentunya kesiapsiagaan bagi setiap masyarakat ketika menghadapi bencana.

Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat sebagai berikut :

“untuk saat ini kita melakukan pendekatan intensif kepada tokoh pemuda untuk mengajak masyarakat yang lain untuk bersama sama melakukan pengawasan dini khusus sekitar kawasan tebing yang curam, menjaga lingkungannya turun ke daerah daerah bersama sama bergotong royong dalam melakukan proses penghijauan”(hasil wawancara HSN 46 tahun 23/10/2017)

Dari pernyataan informan tersebut peran pemerintah juga saat ini telah melakukan pendekatan intensif kepada tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Pemerintah menjalin hubungan dan menyadarkan masyarakat agar mudah menjaga lingkungan dan infrastruktur yang telah dibangun agar dapat mencegah terjadinya bencana tanah longsor.

3. Development (Pembangunan)

Wawancara dengan salah satu anggota BPBD kabupaten Sinjai :

“dalam kegiatan anggaran yang dikeluarkan dalam pembuatan pondasi yang anggarannya dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dibidang sekretariat keuangan daerah disini juga memerlukan keikutsertaan masyarakat baik sebagai pengawas berjalannya proses pencegahan maupun sebagai tenaga bantuan”. (hasil wawancara AJM 55 tahun 25/10/2017)

Dari pernyataan informan diatas memberikan gambaran bagi peneliti bahwa bagaimana pengelolaan anggaran dikelola yaitu dalam tahap

pengelolaan dana dikelola sendiri oleh sekretariat daerah dalam bidang keuangan sehingga fungsi badan penanggulangan bencana daerah, adalah pelaksana lapangan saja diberikan wewenang dalam pengelolaan dana. sehingga dalam hal ini pihak pemerintah membagi fungsinya masing masing selain itu peran serta masyarakat disini dijelaskan sebagai pengawas dari proses pembangunan agar kecurangan kecurangan dari oknum tertentu yang sifatnya merugikan dapat di minimalisir dan juga dapat berguna sebagai sumbangsi tenaga untuk mempercepat proses pembangunan maupun proses pemulihan.

Wawancara dengan masyarakat sebagai berikut :

“jadi setelah dibangun pondasi penguatan tebing masyarakat mengawasi sendiri yang mengontrol dan merawat bangunan tersebut agar tetap terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya, masyarakat juga menjaga kebersihan lingkungannya agar tidak lagi menebang pohon secara sembarang serta melakukan penanaman pohon baru”.(hasil wawancara KHR 38 tahun 23/10/2017)

Penulis menarik kesimpulan dari pernyataan informan tersebut yang menjelaskan tentang tugas masyarakat yang melakukan pemeliharaan agar dapat meminimalisir resiko terjadinya bencana yaitu berfungsi untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul anstipasi yang dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

3.Kontribusi

1.Respons (Tanggapan)

Wawancara dengan kepala BPBD kabupaten Sinjai sebagai berikut :

“Dilokasi yang sifatnya itu rehabilitas maka kita langsung kelapangan untuk mengevakuasi korban ketempat yang lebih aman dengan terlebih dahulu mendirikan tenda gawat darurat atau menyediakan tempat

pengungsian sementara”.(hasil wawancara dengan AJM 55 tahun 25/10/2017)

Pernyataan informan diatas menjelaskan langkah bahwa peran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) ketika terjadi resiko bencana yaitu langkah pertamanya adalah terjun langsung kelokasi yang terkena dampak bencana dengan mengamankan korban ketempat yang telah didirikan tenda atau menyediakan pengungsian sementara.

Wawancara dengan masyarakat sebagai berikut :

“Kami bersama warga lain membantu benahi fasilitas yang rusak akibat tanah longsor, seperti rumah warga jalan dan sebagainya sehingga dapat dipergunakan kembali setelah terjadi longsor sehingga tidak butuh waktu lama untuk bangkit kembali”.(wawancara dengan FDH 58 tahun 21/10/2017)

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas mengukapkan kerjasama sesama masyarakat membangun fasilitas yang rusak sehingga dapat dipergunakan kembali.Pemulihan darurat dengan operasi tanggap darurat pada aspek pemulihan darurat berupa perbaikan prasarana sarana vital seperti : jalan, hal ini dilakukan sejak sesaat setelah kejadian bencana tujuannya adalah untuk mempercepat normalisasi kehidupan sosial ekonomi sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari harinya.

2.Recovery (Pemulihan)

Wawancara dengan Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Sinjai sebagai berikut:

“Kami dari pihak BPBD menurunkan tim supervise istilahnya monitoring langsung di lapangan melihat yang pantas di jaga sebelum bencana terjadi ,jadi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan itu sudah

mengetahui bahwa ini perlu di tangani sementara, karena kita juga tidak bisa melawan alam karena Allah swt.,muda-mudahan kita tidak di berikan apa yang seharusnya di inginkan itulah yang di kasi karna kadang kala bidang kita bisa, karna kita sebagaimanusia hanya bisa melihat dan menafsirkan bahwa daerah ini kemungkinan,kareana kata kemungkinan itu biasa terjadi”.(hasil wawancara MAS 40 tahun 18/10/2017)

Dari penuturan di atas mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi bencana tim dari badan BPBD telah turun kelokasi untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat setiap awal tahun dengan dengan istilah memonitoring dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan yang akan terjadi ketika bencana tanah longsor. Jadi tm kesiapsiagaan telah mengetahui tempat yang perlu di tangani sementara dan Badan Penanggulangan Bencana Tanah Longsor (BPBD) telah berupaya semaksimal mungkin akan tetapi, sebagai manusia biasa tentu tidak bisa melawan alam hingga antisipasi secara dini perlu di lakukan untuk mengantisipasi karena segala kemungkinan bisa terjadi. Diatas merupakan prinsip yan di jalankan BPBD adalah jenis rencana penanggulangan bencana dengan tahap penyusunan pada kondisi normal bersifat pra-kiraan umum pelaku yang terlibat adalah semua pihak yang terkait.

Wawancara dengan salah satu Masyarakat sebagai berikut:

“Lebih lanjut di kemukakan oleh salah satu anggota BPBD

Kabupaten Sinjai:

“Dalam melakukan tahap pemulihan pada orang terkena bencana atau peristiwa troumatik adalah dengan mengurangi tekanan awal seperti mempromosikan tentang keamanan dan keselamatan, menyediakan relawan atau pekerja sosial yang bertugas untuk mendengarkan korban yang ingin berbagi cerita dan emosi mereka, menghadirkan Ulama atau Ustadz dalam memberikan pencerahan, serta membantu korban dalam berkomunikasi

dengan keluarga,teman dan orang-orang yang dicintainya”. (MAS 40 tahun 18/10/2017)

Dari penuturan di atas mengemukakan bahwa dalam tahap pemulihan terhadap korban bencana tanah longsor mengalami tekanan mental atau depresi, pemerintah melakukan beberapa upaya yang dapat membantu korban tersebut kembali ke fungsi semula seperti dengan melibatkan pekerja sosial,serta Ulama atau Ustadz.

3. Development (Pembangunan)

Wawancara dengan Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

“Dalam kegiatan anggaran yang dikeluarkan dalam pembuatan pondasi anggarannya di kelola sendiri oleh pemerintah daerah di bidang sekretariat keuangan daerah,di sini juga memerlukan keikutsertaan masyarakat baik sebagai pengawas berjalannya proses pencegahan maupun sebagai tenaga bantuan”. (Hasil wawancara AJM 55 tahun 25/10/2017)

Dari pernyataan informan di atas memberikan gambaran terhadap peneliti bahwa bagaimana pengelolaan anggaran di kelola, yaitu dalam tahap pengelolaan oleh sekretariat daerah di bidang keuangan sehingga fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), adalah pelaksana di lapangan saja tidak diberikan wewenang dalam pengelolaan dana.

Lebih lanjut di kemukakan oleh masyarakat yang terkena bencana tanah longsor kabupaten sinjai sebagai berikut;

“ Upaya penanganan longsor yang dilakukan adalah penguatan tebing dan memasang pondasi yang berupa beton ,kita juga harus membuat perencanaan dulu dan kesiapsiagaan untuk penanganan sementara bila terjadi bencana”. (hasil wawancara KHR 38/10/2017)

Penuturan diatas memberikan pernyataan bahwa untuk memperbaiki daerah yang terkena longsor,yaitu khusus di daerah tebing langkah yang di ambil adalah penguatan tebing dan memasang pondasi berupa beton yang mampu menahan erosi tanah sehingga tidak menimbung bangunan atau rumah warga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian pada bab hasil dan pembahasan mengenai kerjasama masyarakat dengan BPBD dalam menanggulangi bencana tanah longsor di kabupaten sinjai, pemerintah kabupaten sinjai melalui BPBD telah bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan untuk melatih dan mendidik masyarakat menjadi masyarakat berpengetahuan bencana dan sikap antisipasi terhadap bencana. Pemberdayaan masyarakat siaga bencana dengan pendekatan manajemen sumber daya alam dan lingkungan kabupaten sinjai.

1. Kerjasama masyarakat dan pemerintah khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor sudah baik, sebagaimana diketahui masyarakat ikut berpartisipasi dalam ikut penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ataupun instansi/dinas terkait lainnya, masyarakat juga ikut dalam menjaga pondasi penahan tebing yang telah dibangun sebagai penopang tebing yang curam agar tidak terjadi pengikisan yang dapat menyebabkan terjadinya erosi. Masyarakat juga selalu tanggap dalam menyikapi himbauan dari pemerintah seperti peringatan prabencana dan keikutsertaan dalam pengadaan logistik dan bahan pembuatan pondasi penahan tebing.
2. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor diKabupaten Sinjai sudah baik, ini terlihat dalam

peranan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, yaitu cepat dan tepat bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi/dinas terkait sebagai upaya penanggulangan bencana yang disadarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung, serta dalam penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang. Upaya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang selalu berupaya untuk melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat sebelum terjadi bencana sebagai analisis upaya yang nyata dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran untuk meningkatkan manajemen prabencana masyarakat siaga bencana di kabupaten sinjai antara lain :

1. Masyarakat dan Pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, agar tetap konsisten menjaga prinsip badan penanganggulan bencana.
2. Masyarakat dan Pemerintah (BPBD) daerah segera mencari solusi agar masyarakat tidak lagi membangun rumah tempat tinggal di daerah yang rawan terjadinya tanah longsor agar jatuhnya korban jiwa dapat dicegah sedini mungkin. Usahakan lokasi bangunan sejauh mungkin dari kaki tebing, contoh jika tinggi suatu tebing 100 meter maka usahakan lokasi rumah atau angunan

berjarak minimal 250 meter dari kaki lereng. Sehingga apabila terjadi tanah longsor tidak akan mencapai bangunan tersebut.

3. Masyarakat dan Pemerintah Daerah (BPBD) agar melakukan upaya Preventif yaitu dengan cara mengecek apakah terdapat retakan pada tanah, jika ditemukan maka segera tutup celah retakan itu dengan tanah lempung supaya tidak banyak air masuk kedalam celah retakan tersebut. Selain itu dengan menjaga kelestarian vegetasi di sekitar tebing juga menjadi salah satu upaya pencegahan yang terbukti efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun. 2014. Pengaruh Pengetahuan Kebencanaan Terhadap Kesiapsiagaan Warga Dalam Menghadapi Bencana Tanah Longsor Di Desa Sridadi Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes.
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 2007. *Penanggulangan Bencana Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia*. Departemen Komunikasi dan Informatika RI : Jakarta.
- Harahap.2007. *Peran Dalam Kedudukan di Masyarakat*. Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- Handoko. 2003. *Pengawasan dalam peran pemerintah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Nurjanna, Dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Alfabeta: Bandung.
- Ramli, Soehetman. 2010. *Manajemen Bencana*. Dian Rakyat: Jakarta.
- Sulaeman,dkk.2014. *Evaluasi Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Sebaran Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Sinjai*.vol.3.Hal.12
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)*. Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD*. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia

Ramli, Soehetman. 2010. *Manajemen Bencana.* Dian Rakyat: Jakarta.

Safiie, Kencana Inu. 2007. *Ilmu Pemerintahan.* Mandar Maju : Bandung.

Siagian, Sondang. 2001. *Filsafat Administrasi.* Gunung Agung: Jakarta.

Soerjono, Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Rajawali: Jakarta.

Carter, W. Nick. (1991). *Disaster Manajement : A Disaster Manager's Handbook,* Manila, Asian Development Bank.

Supriyatna. 2011. *Analisis Dampak Terhadap Perekonomian Dengan pendekatan SNSE.* (online) [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285082Analisis dampak](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285082Analisis%20dampak)

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. R&D. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wijayanto, koko. 2012. *Pencegahan dan Manajemen Bencana*. (online). <https://socialstudies17.blogspot.com/2012/11/recognizepencegahanbencana>

LAMP IRAN



Gambar : Foto Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Sinjai



Gambar : Wawancara bersama Bapak Kepala Dinas BPBD Kab.Sinjai



Gambar: Wawancara bersama Bapak Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab.Sinjai



Gambar : Foto bersama Staff Sub Bagian Program ,Data dan Evaluasi BPBD Kab. Sinjai



Gambar : Wawancara bersama beberapa Anggota BPBD Kab.Sinjai



Gambar : Foto bersama Bapak Kepala Dinas BPBD Kab. Sinjai

RIWAYAT HIDUP



Rahmi Dayanti, Lahir pada tanggal 14 Agustus 1995 di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Propensi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, buah cinta dari pasangan Bapak Ikbal dengan ibunda Salma. Penulis memulai pendidikan Tahun 2001 di SD Negeri 87 Manipi dan Lulus Pada Tahun 2007. Kemudian Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan di SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 1 Sinjai Barat dan Lulus Pada Tahun 2010. Kemudian Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan di SMA (Sekolah Menengah Atas) Negeri 1 Sinjai Barat dan Lulus Pada Tahun 2013. Setelah Lulus Penulis Terdaftar Sebagai Mahasiswa Angkatan 2013 Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).